

Rumitnya Menjadi Pemimpin di Indonesia Saat ini



Oleh Drs. H.A. Hamdan, M.M.

Perubahan paradigma pembangunan dan sistem pemerintahan di Indonesia dari hari kehari semakin bergeser, terutama dirasakan dari penataan birokrasi, yang semula sebagai koordinator pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan kepada pelayan masyarakat, hal ini diikuti dengan peraturan yang memayunginya dari UU nomo 5 tahun 1974, ke UU nomor 22 tahun 1999 serta disempurnakan dengan UU nomor 32 tahun 2004.

Implementasi dilapangan ternyata tidak serta merta perubahan paradigma itu diikuti dengan perubahan kebiasaan masyarakat dari sikap meminta bantuan kepada sikap mandiri, bahkan ada sekelompok masyarakat dengan berbagai atribut menjual penderitaan rakyat untuk kepentingan kelompoknya bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Masyarakat sudah terpolarisasi bila akan melakukan suatu kegiatan mengeluarkan sirkulir atau saat ini dikemas dalam sebuah proposal permintaan dana yang disebar kepada seluruh pejabat tanpa memilah dan memilih, apakah pejabat itu ada kaitannya atupun tidak dengan kegiatan yang ditawarkannya. Tidak luput dari berseliweannya proposal.

Berdalih menjual kebersamaan dan memohon kerjasama, didalamnya tersirat minta bantuan dana, fasilitas dan kemudahan bahkan bila perlu menghindar dari hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam membayar pajak dan retribusi. Saat ini ada profesi baru yang disandang dengan sebutan EO.

Dari hari kehari Eo semakin cerdas, semakin cerdik dan semakin lihai untuk melobi para pemegang kebijakan untuk larut kedalam event yang ditawarkan

seolah-olah menguntungkan dan membantu padahal didalamnya ada nilai-nilai ekonomi yang west tidak bisa ditangkap oleh instansi yang berfungsi sebagai pengelola pendapatan daerah.

Berbagai cara yang dilakukan oleh EO untuk mensukseskan event yang diterima dari kliennya, ada yang iming-iming kerjasama, ada iming-iming memberi bantuan sebagai sponsor kegiatan dan ada pula dengan menggunakan cara kasar menggunakan intimidasi secara halus tapi menyakitkan.

Ada dua kutub yang saling berlawanan antara disiplin anggaran dengan desakan masyarakat meminta permohonan bantuannya untuk dikabulkan, sering terjadi pemohon bantuan dana tidak mau tahu dengan kondisi dinas instansi apakah punya anggaran untuk memenuhi bantuan ataupun tidak, bahkan dengan telah diterbitkannya Perrmendagri nomor 13 tahun 2006 bahwa SKPD tidak diperkenankan memberi bantuan baik kepada masyarakat maupun kepada instansi vertical.

Kenyataannya bila pejabat itu tegas menolak permohonannya muncul sikap antipati dari pemohon bahkan berbalik mencari-cari kesalahan yang dilakukan seorang pejabat yang menolak itu, apakah kesalahan dalam kedinasan atau kesalahan masalah pribadi, bahkan bisa menghembuskan isu negate dengan dalih KKN atau Perselingkuhan dan istilah lain yang dikembangkan oleh pemohon yang tidak dikabulkan keinginannya.

Karena masyarakat juga masih senang menanggapi isue bahkan surat kalengpun menjadi alat untuk menjatuhkan orang yang dibencinya, bisa terjadi banyak korban tak berdosa diadili atau harus bolak balik memenuhi panggilan pemeriksaan aparat penegak hukum. Anehnya saat ini surat kaleng pun bisa dijadikan dasar bagi pejabat itu diperiksa.

Sebenarnya bila pejabat itu tidak dibebani pekerjaan yang tidak sesuai dengan uraian tugasnya atau tidak dibebani permohonan bantuan dana non badgeter akan mudah menghilangkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tapi bila jadi pejabat itu **KUDU BISA SING BISA SABISA-BISA** jangan harap akan muncul kader bangsa yang mampu menjalankan amanah sesuai yang digariskan di dalam Al-Quran.

Bila seluruh pejabat masih tetap dibebani dengan penanganan pendanaan non budgeter, mungkin akan muncul penyimpangan dan mungkin muncul pejabat itu apatis dan bisa pula prustrasi, bahkan bisa hanyut terbawa arus dan meyimpang demi mempertahankan jabatannya. Atau stes seperti makan buah simalakalma.

Saat ini kebenar seolah-olah sulit ditegakan, sulit dibedakan antara haram dan halal semakin bersatu seolah-olah sulit dipilah, maka wajar bila diperingatkan oleh Allah SWT dengan berbagai bencan yang menimpa bumi Indonesia tercinta ini.

Sanggupkah aku bertahan hidup dalam dunia yang semakin tidak menentu ini!

Dunia ini semakin samar dan sulit membedakan antara lawan dan kawan, apakah ini termasuk dekade kefasikan, kemunafikan atau pertanda semakin dekatnya ciri-ciri kiamat.

Kami yakin masih banyak orang yang beriman tapi semakin sedikit orang yang berani menjadi korban demi tegaknya keadilan, semua bersembunyi dibalik gemerlapnya keindahan dunia yang pana ini.

Siapakah pemimpin sejati yang islami yang sanggup mengatakan yang sesungguhnya antara yang dirasa oleh hatinya dengan yang diucapkan oleh lidahnya dan yang diolah dalam kecerdasan otaknya.

Bisakah aku berlindung dalam kebenaran atau akan terjerumus dalam fatamorgana dunia ini.

Dengan berubahnya nilai, ternyata pemimpin yang kukuh kepada aturan bila tidak bisa memberi kepada stafnya atau kepada pemohon sumbangan dana akan digunjing dan dijegal setiap kebijakannya dan dicari kelemahannya, masih untung tidak dilakukan sabotase yang bisa mengganggu jalannya roda pemerintahan.

Lebih rumit jadi pejabat bila menghadapi staf yang sudah terbiasa bergelut dengan mafia gaya elit, ketimbang menghadapi orang jahat.

Bagaimana untuk menenangkan kegurdahan hati ini,
Walaupun yakin jawabannya ada dalam Al-Quran.
Tapi kenapa kerumitan ini datang silih berganti

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.